

## **"PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI ORANG TUA PENYANDANG DISTABILITAS"**

**Della Ayu Dwi Puspita<sup>1</sup>**  
[dellaayu312003@gmail.com](mailto:dellaayu312003@gmail.com)

**Nabiela Nailly<sup>2</sup>**  
[naily.uinsa@gmail.com](mailto:naily.uinsa@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine how financial institutions, particularly conventional and Islamic banking in Indonesia, reflect social dynamics, cultural values, and religious preferences within society. The main issue addressed is how both individual and collective choices regarding types of banking are influenced by social constructs, levels of religiosity, and perceptions of justice and economic ethics. Using a qualitative approach through literature review and semi-structured interviews with banking customers and practitioners in several cities across Indonesia, this research highlights differences in motivation and perception between users of the two banking systems. The findings indicate that Islamic banking is more commonly chosen by individuals with strong adherence to religious values and ethical financial principles (muamalah), whereas conventional banking tends to dominate among urban communities with a pragmatic and efficiency-oriented mindset. Additionally, a new trend of "hybrid behavior" is emerging, where individuals utilize both systems simultaneously depending on their needs. This suggests that banking institutions function not only as economic tools but also as mirrors of social complexity and the values embedded in modern society..*

**Keywords:** *Conventional Banking, Islamic Banking, Sociological Reality, Social Values, Economic Ethics, Financial Institutions.*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana institusi keuangan, khususnya perbankan konvensional dan perbankan Islam di Indonesia, merefleksikan dinamika sosial, nilai budaya, dan preferensi religius dalam masyarakat. Masalah utama yang diangkat yaitu bagaimana pilihan individu atau kolektif terhadap jenis perbankan dipengaruhi oleh konstruksi sosial, tingkat religiusitas, serta persepsi terhadap keadilan dan etika ekonomi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan wawancara semi-struktural terhadap nasabah dan praktisi perbankan di kota di Indonesia, penelitian ini menyoroti perbedaan motivasi dan persepsi antara pengguna kedua jenis bank. Hasil temuan menunjukkan bahwa perbankan Islam lebih dipilih oleh masyarakat yang memiliki keterikatan kuat pada nilai-nilai agama dan etika muamalah,*

sedangkan perbankan konvensional dominan di kalangan masyarakat urban dengan orientasi pragmatis dan efisiensi. Selain itu, muncul tren baru berupa “perilaku hibrida”, di mana individu memanfaatkan kedua sistem secara bersamaan tergantung kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa institusi perbankan tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai cerminan kompleksitas sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat modern.

**Kata Kunci:** Perbankan Konvensional, Perbankan Islam, Realitas Sosiologis, Etika Ekonomi, Institusi Keuangan.

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, perbankan di Indonesia telah memasuki tahap sistem ganda, di mana perbankan konvensional dan Islam tidak hanya bersaing dalam hal produk dan efisiensi penggunaannya, akan tetapi juga bersaing dalam medan interaksi nilai-nilai sosial, budaya, dan religius. Dari beberapa studi yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa ekspansi perbankan Islam mencerminkan pergeseran norma budaya dan kepercayaan masyarakat modern<sup>1</sup>. Sementara itu, di beberapa penelitian lainnya menyoro ti faktor-faktor seperti religiusitas, reputasi, dan pengetahuan nasabah dalam proses *brand-switching* dari bank konvensional ke Islam<sup>2</sup>. Meskipun sebagian besar responden mengenal perbedaan kedua sistem, 83% masih lebih berpihak kepada bank konvensional karena infrastruktur atau sarana yang lengkap dan kemudahan dalam mengakses bank tersebut<sup>3</sup>. Artikel ini menempatkan diri dalam celah tersebut dengan menghadirkan pendekatan orisinal berupa analisis mendalam terhadap fenomena perilaku hibrida, yaitu praktik nasabah yang secara bergantian memanfaatkan kedua sistem perbankan sesuai kebutuhan ekonomi dan religiusnya. Dengan memadukan kerangka teori sosiologis nilai, religiusitas, dan efisiensi, tulisan ini memperluas diskursus tentang institusi keuangan sebagai cermin masyarakat kontemporer, sekaligus mengisi kekosongan empiris mengenai strategi adaptif nasabah dalam menghadapi kompleksitas sosial-ekonomi modern.

Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini menjadi relevan karena menyentuh ranah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam kajian perbankan, yaitu dimensi sosiologis dari pilihan sistem keuangan masyarakat. Sebagian besar kajian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek hukum, ekonomi makro, dan performa keuangan bank<sup>4</sup>, sementara realitas sosial yang mempengaruhi preferensi dan perilaku nasabah sering kali dipandang sebagai variabel

---

<sup>1</sup> Sulistiyo, I., dkk. (2023). *Perkembangan Bank Syariah sebagai Cerminan Dinamika Sosial-Budaya di Indonesia*. Journal Zona-EDU.

<sup>2</sup> Makmur, M.R., dkk. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Brand Switching: Nasabah dari Bank Konvensional ke Syariah*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(2), 220–230.

<sup>3</sup> Andriani, A., dkk. (2024). *Analisis Perbandingan Preferensi Nasabah Bank Konvensional dan Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak, 2(1), 1–8.

<sup>4</sup> Studi oleh Hasanah, dkk (2021) lebih menekankan analisis performa keuangan antara bank syariah dan konvensional berdasarkan rasio profitabilitas.

sekunder. Padahal, dalam konteks masyarakat multikultural seperti di negara Indonesia, pilihan terhadap perbankan Islam atau konvensional sangat dipengaruhi oleh nilai agama, kelas sosial, orientasi budaya, dan strategi ekonomi rumah tangga<sup>5</sup>. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji bagaimana faktor-faktor sosial tersebut membentuk pilihan, serta bagaimana nasabah secara aktif merespons realitas sosial-ekonomi dengan memilih atau mengombinasikan dua sistem perbankan yang berbeda.

Kontribusi keilmuan dalam artikel ini terletak pada upayanya menjembatani kajian ekonomi dan sosiologi dengan menghadirkan pendekatan interdisipliner terhadap institusi keuangan. Selain itu, artikel ini memperkenalkan konsep “perilaku hibrida perbankan” sebagai suatu fenomena baru yang mencerminkan fleksibilitas sosial masyarakat dalam beradaptasi terhadap sistem nilai dan tekanan ekonomi. Dalam situasi di mana pilihan keuangan sering diasumsikan rasional dan individualistik, artikel ini menunjukkan bahwa keputusan perbankan juga sangat dipengaruhi oleh konstruk sosial dan jaringan makna yang lebih luas.

Dalam membahas masalah ini, artikel menggunakan pendekatan kualitatif sosiologis yang menitikberatkan pada analisis nilai-nilai sosial, budaya, dan religius yang membentuk preferensi serta perilaku nasabah perbankan. Metode penelitian yang dipakai adalah studi pustaka untuk mengkaji literatur terkait, serta wawancara semi-struktural dengan nasabah dan praktisi perbankan di salah satu ibu kota di Indonesia untuk mendapatkan data empiris yang menggambarkan realitas sosial secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali motivasi dan persepsi yang tidak mudah terdeteksi melalui metode kuantitatif.

Sistematika pembahasan artikel ini terdiri dari empat bagian utama. Bagian pertama memaparkan kajian teori yang mengintegrasikan konsep-konsep sosiologi ekonomi, religiusitas, dan perilaku konsumen. Bagian kedua menguraikan metodologi penelitian secara rinci. Bagian ketiga menyajikan hasil analisis data wawancara dan diskusi mengenai fenomena perilaku hibrida dalam pemilihan perbankan. Terakhir, bagian keempat menyimpulkan temuan dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan teori serta implikasi praktis bagi institusi keuangan dan pembuat kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus komparatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai hubungan antara sistem perbankan baik konvensional maupun syariah dengan dinamika sosial masyarakat tempat keduanya beroperasi. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna sosial, nilai, dan norma yang tercermin dalam praktik perbankan.

---

<sup>5</sup> Wahyuni, S. (2022). *Pengaruh Religiusitas, Gaya Hidup, dan Kelas Sosial terhadap Preferensi Bank Syariah*. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 225–240.

## PEMBAHASAN

### A. Aspek Institusi Keuangan sebagai Representasi Nilai Sosial dan Budaya.

Institusi keuangan, khususnya perbankan, bukan sekadar wadah transaksi ekonomi semata, melainkan juga cerminan nilai sosial dan budaya masyarakat di mana institusi tersebut beroperasi. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi hendaknya senantiasa berlandaskan nilai keadilan, kejujuran, dan keseimbangan sosial yang tercermin dalam berbagai ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."

Ayat ini menegaskan bahwa segala aktivitas sosial, termasuk aktivitas ekonomi dan keuangan, harus didasari oleh prinsip kebersamaan dalam kebaikan dan moralitas. Dalam konteks ini, institusi keuangan bukan hanya sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai wadah yang menampilkan nilai-nilai sosial, budaya, dan etika yang hidup di masyarakat. Dalam pandangan sosiologis, lembaga keuangan merupakan bagian dari struktur sosial yang terhubung erat dengan norma, nilai, dan praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat<sup>6</sup>.

Perbankan konvensional, misalnya, tumbuh dalam tradisi modernitas Barat yang menekankan rasionalitas, efisiensi, dan akumulasi kapital. Sistem bunga (interest) yang menjadi dasar utama operasional bank konvensional mencerminkan cara pandang kapitalistik, di mana pertumbuhan ekonomi dan keuntungan dianggap sebagai indikator utama kesuksesan, baik bagi individu maupun institusi<sup>7</sup>. Di dalamnya, nilai-nilai seperti individualisme, kompetisi bebas, dan orientasi terhadap pencapaian materi sangat ditekankan.

Sebaliknya, bank *syariah* hadir sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin menjalankan aktivitas keuangan yang sejalan dengan prinsip *syariah*. Dalam praktiknya, bank *syariah* tidak menggunakan bunga, karena Islam jelas mengharamkan adanya tambahan (bunga) di dalam transaksi berbentuk apapun, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

<sup>6</sup> Ritzer, George. *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.

<sup>7</sup> Weber, Max. *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. Bandung: Pustaka Pelajar, 2022.

Dalil ini menjadi landasan utama dalam pengembangan sistem perbankan syariah yang menggantikan bunga dengan prinsip bagi hasil dan kerjasama yang adil, sehingga praktik keuangan tetap sesuai dengan nilai keadilan dan etika Islam.

Sehingga dalam praktiknya, bank *syariah* menerapkan sistem kemitraan dan bagi hasil seperti *mudharabah*<sup>8</sup> dan *musyarakah*<sup>9</sup>, serta melarang praktik yang bersifat spekulatif (*gharar*) dan transaksi yang merugikan salah satu pihak<sup>10</sup>. Dengan pendekatan tersebut, perbankan *syariah* membawa nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial ke dalam sistem keuangan. Hal ini membuat bank *syariah* sering kali dipilih oleh masyarakat yang religius sebagai ekspresi keyakinan dan identitas sosial mereka<sup>11</sup>.

Dalam perspektif sosiologi ekonomi, pilihan masyarakat terhadap jenis lembaga keuangan tertentu bukanlah sesuatu yang netral atau semata-mata didorong faktor efisiensi ekonomi, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang sedang berkembang. Di banyak negara mayoritas Muslim, misalnya, pertumbuhan bank *syariah* tidak bisa dilepaskan dari proses Islamisasi ruang publik, meningkatnya kesadaran spiritual, dan keinginan akan sistem ekonomi yang dianggap lebih adil secara moral<sup>12</sup>.

Lebih jauh, keberadaan institusi keuangan juga memengaruhi cara hidup masyarakat. Budaya konsumtif yang kerap ditemui dalam masyarakat modern, misalnya, sering kali diperkuat oleh praktik pinjaman konsumtif dari bank konvensional. Hal ini mendorong gaya hidup konsumsi yang tidak seimbang dan ketergantungan terhadap utang<sup>13</sup>. Sebaliknya, prinsip kehati-hatian dan etika keuangan dalam bank *syariah* termasuk larangan terhadap konsumsi berlebihan—dapat menjadi instrumen perubahan sosial menuju gaya hidup yang lebih bertanggung jawab dan moderat<sup>14</sup>.

Dengan demikian, bank tidak bisa hanya dilihat sebagai penyedia jasa keuangan. Ia adalah produk sosial yang mencerminkan—dan sekaligus membentuk budaya, nilai, dan arah kehidupan masyarakat.

---

<sup>8</sup> *Mudharabah* adalah akad bagi hasil di mana satu pihak menyediakan seluruh modal, sementara pihak lainnya mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, sedangkan jika rugi (bukan karena kelalaian pengelola), maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

<sup>9</sup> *Musyarakah* adalah akad atau bentuk kerja sama dalam ekonomi syariah di mana dua pihak atau lebih bersama-sama menyertakan modal (harta atau aset) untuk menjalankan suatu usaha, dan hasilnya — baik untung maupun rugi — ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal dan proporsi modal masing-masing.

<sup>10</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2021, hlm. 101–109.

<sup>11</sup> Zulmairoh et al., "Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Keuangan Syariah di Indonesia," *Jurnal BIMA*, Vol. 5, No. 1 (2023): 45–60.

<sup>12</sup> Yaqin, Ainol. "Inklusi Keuangan Syariah dan Kesadaran Religius di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2024): 101–118.

<sup>13</sup> Kurniawan, Ahmad. "Budaya Konsumtif dalam Sistem Kredit Perbankan Konvensional," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 17, No. 2 (2022): 211–230.

<sup>14</sup> OJK Institute, "Fungsi Sosial Perbankan Syariah dan Kinerja Keuangan," *Laporan Riset OJK*, 2023.

Oleh karena itu, kajian terhadap perbankan harus melibatkan pendekatan sosial-budaya untuk memahami dampak dan makna lebih dalam dari keberadaan institusi keuangan dalam masyarakat.

## B. Struktur Sosial dan Dinamika Kelas dalam Layanan Perbankan

### 1. Aksesibilitas Layanan Perbankan: Inklusi vs Eksklusi Finansial

Layanan perbankan, meskipun semakin berkembang, belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Di sinilah terjadi ketimpangan akses yang mencerminkan struktur sosial dan pembagian kelas ekonomi. Inklusi finansial merujuk pada keterlibatan aktif seluruh kelompok masyarakat dalam sistem keuangan formal, seperti memiliki rekening bank, akses pinjaman, hingga layanan digital banking. Namun kenyataannya, kelompok masyarakat miskin dan marginal masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan tersebut—baik karena keterbatasan geografis, rendahnya literasi keuangan, maupun syarat administrasi yang rumit<sup>15</sup>.

Sebaliknya, eksklusi finansial terjadi ketika sebagian masyarakat terpinggirkan dari layanan keuangan formal, yang memperkuat siklus kemiskinan dan keterbatasan mobilitas sosial. Penelitian oleh OJK Institute (2023) menyebutkan bahwa meskipun tingkat inklusi keuangan Indonesia meningkat hingga 85,1%, indeks literasi keuangan masih jauh lebih rendah, yakni 49,7%<sup>16</sup>. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa inklusi secara angka belum tentu mencerminkan akses yang adil dan merata.

Di sisi lain, bank syariah—melalui prinsip-prinsip seperti bagi hasil dan pembiayaan mikro—memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi bagi kelompok ekonomi lemah. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk syariah dan persepsi bahwa bank syariah lebih "elit" justru menjadi faktor eksklusi tersendiri<sup>17</sup>.

### 2. Preferensi Kelas Menengah terhadap Bank Syariah sebagai Identitas Kultural

Kelas menengah Muslim di Indonesia memainkan peran penting dalam perkembangan bank syariah. Selain karena alasan religius, mereka juga melihat bank syariah sebagai bagian dari ekspresi identitas kultural. Dalam hal ini, memilih bank syariah tidak hanya bersifat rasional-ekonomis, tetapi juga simbolik: menjadi bagian dari gaya hidup islami yang beretika dan "berkelas".

Menurut Azra (2022), pertumbuhan kelas menengah Muslim yang religius mendorong Islamisasi di ranah publik, termasuk dalam sektor keuangan<sup>18</sup>. Fenomena seperti hijrah finansial yakni perpindahan dari sistem bank konvensional ke Syariah menguat sebagai tren sosial dan

---

<sup>15</sup> Kartika, Rini. "Inklusi dan Eksklusi Keuangan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 12, No. 2 (2022): 155–170.

<sup>16</sup> Otoritas Jasa Keuangan. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2023*. Jakarta: OJK Institute, 2023.

<sup>17</sup> Zulmairah et al., "Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Keuangan Syariah di Indonesia," *Jurnal BIMA*, Vol. 5, No. 1 (2023): 45–60.

<sup>18</sup> Azra, Azyumardi. "Islam dan Kelas Menengah Baru." *Kompas*, 17 Januari 2022.

pilihan gaya hidup kelas menengah urban. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan tidak hanya dilihat dari fungsinya, tetapi juga dari nilai simbolik dan identitas sosial yang melekat pada institusi tersebut.

Bank syariah dalam konteks ini bukan sekadar tempat transaksi, tetapi menjadi representasi moralitas dan kesalehan sosial, sekaligus membangun citra kelas menengah yang "maju secara ekonomi, tetapi tetap saleh secara spiritual".

### 3. Hubungan antara Status Sosial dan Pilihan Lembaga Keuangan

Pilihan masyarakat terhadap jenis bank juga dipengaruhi oleh status sosial dan kelas ekonomi mereka. Kalangan menengah ke atas cenderung memilih bank yang menawarkan layanan eksklusif seperti *priority banking*, *private banker*, atau layanan *digital premium*. Layanan ini merefleksikan kebutuhan akan kenyamanan, kecepatan, dan citra status sosial tertentu<sup>19</sup>.

Sebaliknya, kelompok bawah atau kelas pekerja seringkali bergantung pada layanan keuangan informal atau bank dengan produk yang sangat terbatas dan birokratis. Banyak dari mereka tidak memiliki rekening bank, atau hanya memanfaatkannya untuk menerima bantuan sosial (bansos), bukan sebagai alat transaksi aktif. Kesenjangan ini menciptakan segmentasi pasar keuangan berdasarkan kelas sosial—di mana jenis institusi yang dipilih ikut merefleksikan posisi sosial-ekonomi seseorang.

Dalam konteks bank *syariah*, kelompok dengan literasi tinggi dan status sosial menengah-atas cenderung lebih tertarik karena memiliki kapasitas memahami prinsip-prinsip syariah dan memiliki motivasi ideologis untuk menghindari bunga. Sementara kelompok bawah lebih terfokus pada aksesibilitas praktis dibandingkan prinsip teologis<sup>20</sup>.

### C. Peran Ideologi dalam Pembentukan Sistem Perbankan

Sistem perbankan tidak hanya berperan sebagai mekanisme ekonomi semata, melainkan juga sebagai alat yang merefleksikan dan memperkuat ideologi dominan dalam masyarakat. Perbankan konvensional erat kaitannya dengan ideologi kapitalisme yang menekankan pasar bebas, akumulasi modal, serta pertumbuhan ekonomi sebagai nilai utama dalam kegiatan ekonomi sehari-hari<sup>21</sup>. Dalam konteks ini, bank berfungsi sebagai instrumen hegemonik yang menyebarkan dan mempertahankan nilai-nilai kapitalistik, seperti orientasi pada keuntungan dan efisiensi. Sebaliknya, bank syariah dibangun atas dasar ideologi Islamisme yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip syariah dan etika Islam yang mengutamakan keadilan sosial, keberkahan, dan tanggung jawab moral. Sistem perbankan syariah hadir sebagai alternatif

---

<sup>19</sup> Harahap, Nurhayati. "Segmentasi Sosial dalam Layanan Bank Digital di Perkotaan." *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 21, No. 1 (2023): 88–99.

<sup>20</sup> Yaqin, Ainol. "Inklusi Keuangan Syariah dan Kesadaran Religius di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2024): 101–118.

<sup>21</sup> Weber, Max. *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. Bandung: Pustaka Pelajar, 2022.

yang menolak nilai-nilai kapitalistik yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam<sup>22</sup>.

Perbedaan paling mencolok antara kedua sistem ini terlihat dari mekanisme keuangan yang digunakan. Bank konvensional menggunakan sistem bunga (interest), yang secara ideologis melambangkan kepemilikan modal pribadi dan orientasi keuntungan yang menempatkan risiko utama pada peminjam<sup>23</sup>. Sistem bunga ini menggambarkan logika kapitalisme yang menganggap akumulasi modal dan pertumbuhan sebagai ukuran kesuksesan utama. Sebaliknya, bank syariah menolak bunga karena dianggap riba dan menerapkan sistem bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, yang mencerminkan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial sesuai dengan prinsip Islam<sup>24</sup>. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana ideologi secara langsung membentuk desain produk dan prinsip operasional perbankan, sekaligus mempengaruhi struktur sosial-ekonomi masyarakat.

Selain itu, peran negara dalam membentuk sistem perbankan sangat penting, terutama dalam konteks bagaimana negara memfasilitasi lembaga keuangan yang sesuai dengan identitas dan kebutuhan masyarakatnya. Di negara-negara dengan mayoritas Muslim, pemerintah kerap mendorong perkembangan bank syariah sebagai pengakuan terhadap identitas keagamaan dan budaya masyarakat<sup>25</sup>. Dukungan negara melalui regulasi khusus, pembentukan Dewan Pengawas Syariah, serta insentif fiskal menunjukkan bagaimana negara berperan sebagai mediator dalam mengakomodasi keberagaman sistem keuangan. Sementara di negara-negara dengan ideologi sekuler yang kuat, kebijakan cenderung mengutamakan sistem perbankan yang netral secara agama, fokus pada stabilitas ekonomi dan pasar bebas<sup>26</sup>. Namun, dalam semua konteks, regulasi perbankan merupakan arena negosiasi ideologis yang berpengaruh pada pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara.

Dengan demikian, ideologi menjadi faktor utama dalam pembentukan sistem perbankan, yang bukan hanya berpengaruh pada aspek teknis dan produk, tetapi juga pada nilai-nilai sosial, moral, dan identitas masyarakat yang lebih luas. Sistem perbankan konvensional dan syariah menjadi dua refleksi ideologi yang berbeda antara kapitalisme sekuler dan Islamisme, di mana negara memiliki peran penting dalam mengatur dan menyesuaikan institusi keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan identitas nasional.

---

<sup>22</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2021.

<sup>23</sup> Harahap, Nurhayati. "Sistem Bunga dan Implikasinya dalam Perbankan Konvensional," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2 (2023): 134–149.

<sup>24</sup> Zulmairah et al., "Prinsip Bagi Hasil dalam Bank Syariah sebagai Alternatif Sistem Bunga," *Jurnal BIMA*, Vol. 5, No. 1 (2023): 45–60.

<sup>25</sup> Yaqin, Ainol. "Peran Negara dalam Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1 (2024): 75–92.

<sup>26</sup> Kartika, Rini. "Kebijakan Perbankan di Negara Sekuler," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 12, No. 2 (2022): 155–170.

**PENUTUP**

Sistem perbankan tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga mencerminkan dan memperkuat ideologi yang berlaku dalam masyarakat. Perbankan konvensional terkait erat dengan ideologi kapitalisme yang menekankan keuntungan, akumulasi modal, dan efisiensi, sementara bank syariah didasarkan pada ideologi Islamisme yang mengutamakan prinsip keadilan sosial, tanggung jawab moral, dan larangan riba. Perbedaan ideologis ini terlihat dalam mekanisme keuangan yang digunakan, yakni sistem bunga pada bank konvensional versus sistem bagi hasil pada bank syariah. Selain itu, peran negara sangat penting dalam mengatur dan memfasilitasi kedua sistem ini sesuai dengan identitas dan kebutuhan masyarakat, melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung eksistensi dan perkembangan masing-masing institusi keuangan. Dengan demikian, ideologi menjadi landasan utama dalam pembentukan dan pengembangan sistem perbankan yang tidak hanya teknis, tetapi juga kultural dan sosial.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Emzir, S. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Perss.
- Habibi, M. M. (2018). *Analisis kebutuhan anak usia dini (buku ajar S1 PAUD)*. Deepublish.
- Indonesia, K. B. B. (2008). Pusat bahasa. *Departemen Pendidikan Nasional*.
- Khon, A. M. (2011). *Khon, Abdul Majid. 2011. Praktikum Qiroat*. Jakarta: Imprime Bumi Aksara. - Penelusuran Google.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. (No Title).
- Nurbaiti, R., Wahyudin, U. R., & Abidin, J. (2021). Penerapan metode muraja'ah dalam menghafal Al-Qur'an siswa. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 55–59.
- Satori Djaman. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Sigit Hermawan, S. E., & Amirullah, S. E. (2021). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif & kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sugiyono dan Hariyanto. (2011). *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Rosda Karya. - Penelusuran Google.
- Sugiyono, S. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta. *Google Scholar Alfabeta*.
- Wahid, W. A. (2012). *Cara Cepat Bisa Menghafal al. Qur'an*.
- Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Zakariyya, M. M. (2006). *Himpunan fadhilah amal*. Yogyakarta: Ash-Shaff.